

**Pengaruh Upah, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja Jawa Barat**

Nabilatus Solihah

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: nabilatus21055@mhs.unesa.ac.id

Kukuh Arisetyawan

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: kukuharisetyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Ketenagakerjaan ialah masalah paling mendasar karena mencakup aspek sosial dan ekonomi, terutama pada provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia yaitu Jawa Barat. Tujuan penelitian ini yaitu meninjau bagaimana pengaruh upah minimum, angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia pada tingkat penyerapan tenaga kerja di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisa regresi data panel. Hasil penelitian ini ialah angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh secara positif pada penyerapan tenaga kerja, upah minimum memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan. Ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Kata Kunci: Upah Minimum, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja

Abstract

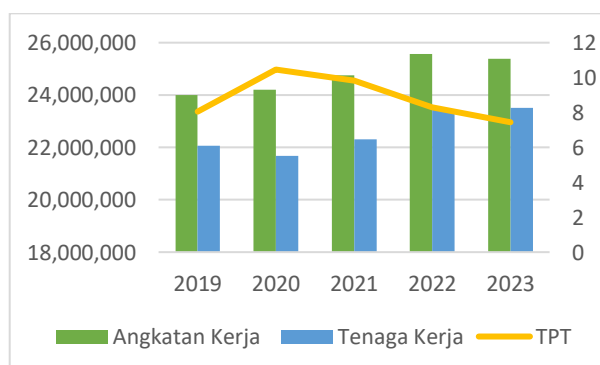
Employment is the most fundamental problem because it covers social and economic aspects, especially in the province with the largest population in Indonesia, namely West Java. This research aims to review the influence of the minimum wage, labor force, and human development index on the level of labor absorption in 27 West Java regencies/cities from 2019 to 2023. This research uses quantitative research methods and panel data regression analysis techniques. The results of this research are that the labor force and human development index have a positive effect on labor absorption, and the minimum wage has a negative and significant impact. Simultaneously, these three independent variables influence labor absorption in West Java.

Keywords: Minimum Wage, Work Force, Human Development Index, Labor Absorption

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang paling mendasar karena mencakup aspek sosial dan ekonomi, terutama pada negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, meningkat 32,56 juta dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Total penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan meningkatnya total angkatan kerja (Anggrya & Maimunah, 2024). Hal tersebut berpotensi pada tekanan pasar tenaga kerja. Terlebih lagi, Indonesia berada dalam periode bonus demografi, dimana sekitar 70,72% jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh angkatan kerja. Bonus demografi di Indonesia diperkirakan di mulai sejak tahun 2012 dan puncaknya tahun 2020-2030 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). Bonus demografi memiliki dua sisi yaitu *windows of opportunity* atau *windows of disaster* yang berarti apabila dioptimalkan dengan efektif maka dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, bonus demografi dapat menjadi ancaman apabila pemangku atau pemerintah tidak mengoptimalkan secara baik sehingga akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Hasanah & Armanda, 2021).

Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi tertinggi di Indonesia dengan total 48,27 juta yang mencakup 17,81% dari total penduduk nasional juga memiliki tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi. Sekain itu, Jawa Barat memiliki pertumbuhan ekonomi nomor satu dan tertinggi di Pulau Jawa sebesar 5,18% dengan kontribusi sebesar 57,27% terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku nasional (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023). Jawa Barat berpotensi besar menyerap tenaga kerja karena pertumbuhan ekonomi tertinggi. Akan tetapi, pada Provinsi Jawa Barat menunjukkan kondisi yang belum optimal dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan 10 kabupaten/kota pengangguran tertinggi yang berada di Pulau Jawa 60% pengangguran berasal dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pengangguran mencerminkan adanya gap antara angkatan kerja dengan total tenaga kerja yang berhasil terserap (Anggrya & Maimunah, 2024).



Gambar 1. Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Barat

Berdasarkan pada gambar 1.1 permasalahan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat tampak pada ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan

jumlah keterserapan tenaga kerja. Angkatan kerja terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2019 hingga 2022, menunjukkan semakin banyak orang yang siap bekerja. Namun, pertumbuhan jumlah keterserapan tenaga kerja di Jawa Barat tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Penyerapan tenaga kerja tidak mampu mengimbangi laju angkatan kerja yang terus meningkat, terutama tahun 2020 ketika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memuncak akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, TPT berangsur-angsur menurun, namun masih terdapat kesenjangan antara populasi angkatan kerja dengan tenaga kerja. Pada tahun 2023, meskipun angkatan kerja menurun, penyerapan tenaga kerja tidak menunjukkan pertumbuhan yang sepadan. Kondisi ini menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat masih menghadapi masalah penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa penciptaan lapangan kerja belum mampu untuk menyerap tambahan angkatan kerja yang tersedia, akibatnya permasalahan pengangguran tetap ada meskipun tingkatnya sudah berkurang dibandingkan puncaknya pada 2020.

Upah minimum ialah suatu komponen percepatan penyerapan tenaga kerja. Penetapan upah minimum sendiri menimbulkan berbagai dilema. Di satu sisi, apabila upah minimum mengalami kenaikan dapat berpengaruh positif bagi tenaga kerja karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat dari meningkatnya pendapatan. Namun, di sisi lain upah minimum dapat berpengaruh negatif bagi tenaga kerja, jika upah minimum meningkat, jumlah tenaga kerja berpotensi menurun sehingga menimbulkan pengangguran (Saputri et al., 2019). Menurut teori Mankiw, jika upah mengalami kenaikan, berdampak pada pengurangan permintaan tenaga kerja sebab biaya yang besar harus ditanggung oleh perusahaan.

UMP Jawa Barat merupakan salah satu peringkat terendah nasional pada tahun 2023 sebesar Rp 1.986,670,00 setelah DI. Yogyakarta sebesar Rp 1.981.782,00 dan Jawa Tengah sebesar Rp 1,958.169,00 (Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Tren rata-rata UMK menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Di tahun 2019, rata-rata UMK berada di angka Rp2.731.081,47. Kemudian, pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan sebesar 8,51%, sehingga rata-rata UMK mencapai Rp2.963.496,29. Pada tahun 2021 peningkatan UMK hanya sekitar 2,61% yaitu sebesar Rp 3.040.731,55. Kenaikan UMK pada tahun 2022 lebih lambat daripada tahun sebelumnya 1,03% sehingga rata-rata UMK yang tercatat sebesar Rp 3.072.179,43. Namun, pada tahun 2023, rata-rata UMK kembali mengalami lonjakan lebih besar, naik sebesar 7,31% dan mencapai Rp3.297.012,10. Tren kenaikan ini mencerminkan peningkatan yang berkelanjutan dalam standar upah di Jawa Barat, dengan perbedaan laju kenaikan setiap tahunnya.

Jika dilihat pada gambar 1 secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2023, tren lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Jawa Barat. Dengan tren peningkatan jumlah angkatan kerja, maka jumlah pencari kerja semakin bertambah (Utami et al., 2023). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dimana persaingan antar individu dalam memperoleh posisi yang tersedia semakin ketat (Nurhazanah & Pujiati, 2024). Pada kondisi ini, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar dibandingkan permintaan tenaga kerja. Menurut Lewis, kelebihan angkatan kerja di sektor tradisional dapat dimanfaatkan

atau diserap oleh sektor modern (Mulyadi, 2008). Namun apabila sektor modern tidak mampu menyerap angkatan kerja, maka kelebihan angkatan kerja dapat menyebabkan pengangguran atau pekerjaan dengan produktivitas rendah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penyediaan lapangan pekerjaan harus diiringi oleh peningkatan kualitas tenaga kerja yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. IPM mencerminkan kapasitas tenaga kerja pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang berperan penting untuk memperkuat keunggulan di pasar tenaga kerja (Heryanto, 2023).

Hal ini sejalan dengan teori modal manusia yang dikemukakan Becker dalam (Teixeira, 2014) bahwa investasi modal manusia pada pendidikan dapat meningkatkan modal manusia serta harapan hidup yang lebih panjang yang dapat mendorong individu untuk menempuh pendidikan lebih lama karena mampu menawarkan prospek keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Tak hanya itu, investasi modal manusia memengaruhi pendapatan dan distribusi pendapatan, pendapatan yang lebih besar cenderung diperoleh oleh individu dengan keterampilan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi permintaan tenaga kerja yang terampil semakin meningkat, yang berdampak terhadap peningkatan tingkat investasi pada pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan IPM menjadi sangat penting untuk memastikan angkatan kerja dapat bersaing dengan efektif. IPM Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 IPM Jawa Barat yaitu 72.03 pada tahun 2023, IPM mencapai 73,74, mencatat angka tertinggi dalam periode tersebut. Ketika IPM mengalami kenaikan maka dapat berpotensi mengurangi pengangguran. Namun kenyataannya IPM di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan yang fluktuatif bahkan mengalami persentase penurunan dari 0,9 hingga 0,8. Hal tersebut juga dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pengangguran.

Penyerapan tenaga kerja ialah indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Aspek-aspek yang memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan geografis suatu wilayah. Heryanto (2023) dan Wiasih & Karmini (2021) mendapatkan temuan jumlah angkatan kerja dan IPM memiliki pengaruh pada tenaga kerja yang terserap, sedangkan penelitian oleh Rizma & Muchtolifah (2023) Penyerapan Tenaga Kerja di Nganjuk menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi maupun upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan. Silvia & Susilowati (2023) juga mengidentifikasi bahwa IPM serta upah minimum berpengaruh signifikan, meski hasilnya dapat berbeda bergantung pada lokasi. Berbeda dengan hasil penelitian lain, studi oleh Yuda Pratama et al. (2022) menunjukkan Upah Minimum terdapat pengaruh negatif kepada penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut pengaruh Upah Minimum, Jumlah Angkatan Kerja, serta Indeks Pembangunan Manusia pada penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat tahun 2019-2023 untuk memperdalam pemahaman terkait pola penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang merupakan pendekatan positivisme untuk meneliti populasi atau sampel melalui pengumpulan data terstandar dan analisis statistik dalam menguji hipotesis (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik Jawa Barat dan Open Data Jabar. Pada penelitian ini menggunakan data panel pada tingkat regional yaitu provinsi Jawa Barat yang memiliki 27 Kabupaten/Kota sebagai data *cross-sectional* serta *time series* pada periode tahun 2019 sampai 2023. Teknik analisis terdiri dari uji model terbaik, uji asumsi klasik, uji koefisien regresi secara parsial (Uji t), Uji secara menyeluruh yaitu Uji Simultan (Uji F), serta Uji Koefisien Determinasi (R^2). E-views 12 merupakan perangkat lunak yang dimanfaatkan pada penelitian ini.

Analisis ini memiliki fungsi untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah penyerapan Tenaga Kerja (Y). Sedangkan untuk variabel dependen penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (X1), Jumlah Angkatan Kerja (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3). Berikut model ekonometrika penelitian ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(1)$$

$$PTK_{it} = \beta_0 - \beta_1 UM_{it} + \beta_2 AK_{it} + \beta_3 IPM_{it} + e_{it} \dots\dots\dots(2)$$

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja

β : Koefisien Regresi

UM : Upah Minimum Kabupaten/Kota

AK : Jumlah Angkatan Kerja

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

e : error term

i : Kabupaten/Kota

t : rentang waktu (2019-2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Model Terbaik

Untuk memilih model terbaik diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, maupun *Random Effect Model* terdapat beberapa uji yaitu Uji Chow, Uji Hausman serta Uji Langrange. Hal ini dikarenakan tidak semua model data panel cocok untuk diterapkan maka perlu diuji untuk memperoleh model data panel terbaik (Napitulu et al., 2021). Hasil uji chow dalam penelitian ini didapatkan angka F-probabilitasnya sebesar 0.000 kurang dari 0.005 dimana model yang terpilih ialah Fixed Effect. Pada Uji Hausman juga mendapatkan hasil yang serupa yakni Fixed Effect Model. Sehingga tidak membutuhkan uji Lagrange dalam menentukan model terbaik karena uji Lagrange digunakan ketika model yang terpilih yaitu CEM ataupun REM.

Tabel 2. Hasil Uji Model Terbaik

Uji Model Terbaik	Keputusan	
	Probabilitas	
Uji Chow	0.0000	Fixed Effect

Uji Hausman	0.0000	Fixed Effect
-------------	--------	--------------

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model panel terbaik selanjutnya ialah analisis uji asumsi klasik. Menurut Basuki & Prawoto (2016) bahwa pada regresi data panel, cukup menggunakan dua analisa yaitu multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Tujuan dilakukannya multikolinearitas adalah untuk mengidentifikasi apabila terdapat korelasi diantara variabel independen. Hasil multikolinearitas dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas sebab mendapatkan bahwa nilai koefisien kurang dari 0,8. Berikut adalah matriks multikolinearitas.

Tabel 1. Hasil Multikolinearitas

Variabel	UM	AK	IPM
UM	1.000	0.506	0.555
AK	0.506	1.000	0.020
IPM	0.555	0.020	1.000

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Selain itu, pada heterokedastisitas yang menggunakan metode Glejser didapatkan bahwa hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah nilai probabilitasnya diatas 0.05 yang berarti tidak terindikasi heterokedastisitas. Berikut output uji heterokedastisitas.

Tabel 2. Hasil Heterokedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
C	-186585	105410.5	-0.17726	0.859
UM	0.00154	0.005179	0.298628	0.765
AK	-0.0176	0.011786	-1.49918	0.136
IPM	527.973	1662.723	0.317535	0.751

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Uji t

Tabel 3. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
C	-1523486	209763.5	-7.262875	0.0000
UM	-0.047051	0.010306	-4.565598	0.0000
AK	0.887446	0.023454	37.83756	0.0000
IPM	23376.19	3308.763	7.064934	0.0000
R-squared	0.999450	F-statistic		6584.134
Adjusted Rsquared	0.999229	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Diolah penulis 2025

1. Variabel upah minimum (X1) memiliki nilai t hitung $-4.565598 > t$ tabel 1.657 dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ yang berarti upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.
2. Variabel Angkatan Kerja (X2) memiliki angka t hitung $37.8375 > t$ tabel 1.657 dengan angka probabilitas $0.0000 < 0.05$ artinya variabel angkatan kerja secara positif berpengaruh signifikan pada variabel penyerapan tenaga kerja
3. Variabel IPM (X3) memiliki nilai t hitung $7.064934 > t$ tabel 1.657 pada Angka probabilitas $0.0000 < 0.05$ artinya variabel IPM secara positif berpengaruh signifikan pada variabel penyerapan tenaga kerja.

Uji F

Angka probabilitas berdasarkan hasil regresi sebelumnya adalah 0.0000 lebih rendah dari 0.05 yang berarti secara keseluruhan dari variabel upah minimum, jumlah angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan pada penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diukur pada nilai R-square untuk meninjau seberapa besar variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika dilihat dari hasil regresi, pada penelitian ini ditemukan angka R-square yaitu 0.999440. Angka ini berarti variabel independen secara simultan dapat menerangkan sekitar 99.94% dari variasi yang diamati pada variabel dependen. Artinya, sebagian besar tenaga kerja yang diserap di Jawa Barat dapat dijelaskan oleh upah minimum, jumlah angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia. Sementara itu, variabel-variabel lain yang menjelaskan sisanya.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Merujuk kepada output regresi tersebut, Upah Minimum terdapat pengaruh secara negatif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja serta angka koefisien yaitu -0.047051 dan angka probabilitasnya adalah 0.0000 yang berarti jika terjadi peningkatan upah minimum 1 juta rupiah yang dapat menyebabkan penyerapan tenaga kerja menurun mencapai 47.051 pekerja. Menurut teori Mankiw, upah akan selalu beradaptasi dengan tercapainya keseimbangan diantara penawaran dengan permintaan tenaga kerja. Apabila upah mengalami peningkatan, maka berdampak pada pengurangan tenaga kerja sebab biaya yang besar harus ditanggung oleh perusahaan. Pada permintaan tenaga kerja ketika tingkat upah yang lebih tinggi, perusahaan cenderung mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja begitu pun sebaliknya. Jika upah yang ditawarkan semakin meningkat, tenaga kerja yang diminta perusahaan semakin rendah. Ketika kondisi upah naik, perusahaan mencari alternatif lainnya untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin atau teknologi otomatis untuk menghemat biaya yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja (Lestari, 2024). Temuan dari penelitian ini selaras oleh penelitian Habanabakize et al (2019), Utomo (2022), Basuki & Ratnawati (2023), Yuda Pratama et al. (2022) bahwa kenaikan upah mempunyai dampak negatif bagi tenaga kerja yang terserap,

jika upah meningkat di sisi lain biaya input tetap sehingga tenaga kerja memiliki harga yang lebih mahal daripada input lainnya. Selain itu, kenaikan upah dapat menyebabkan perusahaan dalam meningkatkan harga produksi yang dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga hasil produksi tidak laku dan perusahaan mengurangi jumlah produksi dan menurunkan harga jual yang pada akhirnya dapat mengurangi tenaga kerja. Di sisi lain, pengusaha juga dapat memindahkan pabriknya menuju wilayah dengan standar upah minimum yang lebih rendah. Upah Minimum di Jawa Barat merupakan upah tertinggi apabila dibandingkan dengan DKI Jakarta berkisar Rp 4.901.798 sedangkan upah minimum tertinggi pada Jawa Barat berada pada Kabupaten Karawang mencapai Rp 5.158.248.20, Kota Bekasi Rp 5.158.248.20 dan Kabupaten Bekasi Rp 5.137.575.44. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar, tercatat sebanyak 29 perusahaan padat karya dalam proses produksinya mengutamakan sumber daya manusia berlokasi ke Jawa Tengah selama kurun waktu 2019 hingga 2022. Relokasi pabrik tersebut didorong oleh salah satu faktor yaitu tingginya upah minimum di Jawa Barat. Selain relokasi tersebut, pada tahun 2023, terdapat setidaknya lima perusahaan besar yang mengalami penutupan. Penutupan perusahaan-perusahaan ini memiliki dampak signifikan terhadap tenaga kerja yang berkurang sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran.

Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Temuan dari penelitian ini diketahui nilai koefisien variabel angkatan kerja tercatat angka koefisien yaitu 0.887446 dan angka probabilitas 0.000 dimana variabel angkatan kerja terdapat pengaruh secara positif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Saat angkatan kerja naik sebesar 1 juta jiwa, maka jumlah orang yang terserap juga mengalami kenaikan sebesar 887.446 tenaga kerja dengan asumsi variabel lain tetap. Jika jumlah angkatan kerja semakin tinggi, akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan Wiasih & Karmini (2021), Alfin & Priana (2022), Heryanto (2023), Rizma & Muchtolifah (2023), yang menyatakan angkatan kerja terdapat pengaruh yang positif pada penyerapan tenaga kerja. Dengan meningkatnya angkatan kerja, tenaga yang terserap juga cenderung mengalami peningkatan, seiring tersedianya lapangan pekerjaan. Penyebab utama dari hal ini ialah angkatan kerja usia produktif berkontribusi lebih besar dalam proses produksi barang maupun jasa. Temuan dalam penelitian ini selaras menurut teori Lewis yang mengemukakan jika angkatan kerja yang lebih ialah bukan masalah dan menjadi suatu peluang. Angkatan kerja yang lebih dalam suatu sektor dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan output serta menyediakan pekerja untuk sektor lainnya seperti sektor kapitalis dan sektor terbelakang yang mana dalam hal ini tidak hanya sebatas pada sektor pertanian namun sektor non-formal termasuk pedagang kaki lima dan pengecer surat kabar yang memiliki upah relatif murah (Mulyadi, 2008). Menurut laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2023) pekerja informal mendominasi penduduk bekerja dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sebagian besar merupakan berusaha sendiri. Menurut lapangan pekerjaan penduduk bekerja didominasi oleh perdagangan sebanyak 22,8% yang mencerminkan bahwa lapangan pekerjaan perdagangan merupakan penyerapan tenaga kerja tertinggi di

Jawa Barat. Selain itu, menjamurnya UMKM makanan dan minuman di beberapa wilayah Jawa Barat juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di bidang penyediaan akomodasi & makan minum.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Temuan penelitian ini menunjukkan nilai koefisien indeks pembangunan manusia sebesar 23376.19 dengan nilai probabilitas 0.000 artinya variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Jika indeks pembangunan manusia meningkat 1 persen, sehingga penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan mencapai 23.376.19 tenaga kerja termasuk asumsi variabel lain tetap. Temuan penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Hafiz & Haryatiningsih (2020), Ramdani et al. (2021), Purnomo (2021) yang menyatakan indeks pembangunan manusia terdapat pengaruh secara positif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada suatu wilayah berkontribusi pada kemudahan individu dalam memperoleh pekerjaan karena penyerapan tenaga kerja semakin luas. Temuan dalam penelitian ini selaras pada teori modal manusia yang dicetuskan Becker dalam (Teixeira, 2014) investasi modal manusia pada pendidikan dapat meningkatkan modal manusia serta harapan hidup yang lebih panjang yang dapat mendorong individu untuk menempuh pendidikan lebih lama karena mampu menawarkan prospek keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Tak hanya itu, investasi modal manusia memengaruhi pendapatan dan distribusi pendapatan, pendapatan yang lebih besar cenderung diperoleh oleh individu dengan keterampilan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi permintaan tenaga kerja yang terampil semakin meningkat, yang berdampak terhadap peningkatan tingkat investasi pada pendidikan. IPM Jawa Barat merupakan IPM termasuk dalam kategori tinggi yang mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang unggul. IPM Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai 73,74 di atas rata-rata nasional 73,55 yang mencerminkan bahwa penduduk Jawa Barat mempunyai akses lebih baik pada layanan kesehatan, pendidikan seperti terdapat beberapa perguruan tinggi ternama, dan standar hidup yang layak. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Kota Bandung yang mencapai 83.04 sebagai IPM tertinggi di Jawa Barat yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Kota Bandung terdapat berbagai sektor ekonomi yang berkembang seperti teknologi, ekonomi kreatif, dan jasa. Dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul, Kota Bandung memiliki peluang yang lebih besar sehingga lebih mudah terserap di pasar kerja

Pengaruh Upah Minimum, Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Merujuk pada hasil uji F mendapatkan angka F-statistic yaitu 6584.134 serta angka Prob (F-statistic) 0.0000 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, variabel upah minimum, Angkatan Kerja, dan IPM secara simultan memiliki pengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, angka R-square yaitu 0.999440, yang berarti bahwa 99.94 persen dari penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dapat

dijelaskan oleh variabel Upah Minimum, Jumlah Angkatan kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Heryanto (2023) bahwa Jumlah Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja mencerminkan bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih banyak yang nantinya menghasilkan produk barang dan jasa pada berbagai sektor ekonomi baik formal maupun informal. Temuan ini selaras pada teori lewis bahwa kelebihan angkatan kerja dapat diserap oleh sektor lain khususnya sektor informal atau sektor terbelakang. Selain itu, peningkatan IPM berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan teori modal manusia ketika kualitas manusia maka dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan, penurunan upah minimum berpengaruh pada penurunan tenaga kerja selaras dengan teori permintaan tenaga kerja, ketika upah meningkat maka perusahaan mencari alternatif seperti mesin atau teknologi yang dapat mengurangi tenaga kerja.

KESIMPULAN

Dari temuan penelitian ini ditarik kesimpulan secara uji parsial mendapatkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Uji simultan memaparkan bahwa upah minimum, jumlah angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama mempunyai pengaruh pada penyerapan tenaga kerja di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2019-2023.

Merujuk pada temuan tersebut, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dengan cermat kebijakan penetapan besaran UMK agar tidak menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, proses penentuan upah minimum yang dipengaruhi oleh faktor politik menjadi tantangan dalam merefleksikan keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja. Selain itu, pendidikan dan kesehatan tetap berada pada prioritas utama pemerintah karena dua aspek tersebut merupakan bagian dari indeks pembangunan manusia yang berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja seiring dengan angkatan kerja yang terus bertambah. Untuk penulis berikutnya dapat memasukkan variabel lain yang berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja.

REFERENSI

- Alfin, M. M., & Priana, W. (2022). Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Investasi, Upah Minimum Kabupaten / Kota(UMK), dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9).
- Anggrya, Y., & Maimunah, E. (2024). *Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa*. 06(04), 18544–18551.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023a). *Indikator Makro Provinsi Jawa Barat 2022-2023*.

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023b). *LAPORAN EKSEKUTIF KEADAAN ANGKATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT AGUSTUS 2023*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Basuki, A. T., & Ratnawati, D. (2023). *Analysis of the Influence of Macroeconomic Variables on Labor Absorption in Java Island*. 6(3), 927–935.
- Habanabakize, T., Meyer, D. F., & Oláh, J. (2019). The impact of productivity, investment and real wages on employment absorption rate in South Africa. *Social Sciences*, 8(12), 1–15. <https://doi.org/10.3390/socsci8120330>
- Hafiz, E. A., & Haryatiningsih, R. (2020). *Pengaruh PDRB , UMK , IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020*. 55–65.
- Hasanah, U., & Armanda, D. (2021). Analisis Dampak Bonus Demografi Terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Aceh. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 7 (2), 55–66.
- Heryanto, G. et al. (2023). Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *JEMAI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1).
- Mulyadi. (2008). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Napitulu, R. B., Simanjutak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS STATA EViews* (1st ed.). MADENATERA.
- Nurhazanah, S. N., & Pujiati, H. (2024). *Strategi Freshgraduate Dalam Menghadapi Dunia Kerja*. 4(2), 1246–1257.
- Purnomo, S. D. (2021). Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.311>
- Ramdani, A. N., Supadi, & Kadarwati, N. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA TENGAH PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno , 2010 : 61*. 23(2), 16–31.
- Rizma, Z. O., & Muchtolifah. (2023). Pengaruh Upah Minimum Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Nganjuk. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6356–6362.
- Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). *Portal Data Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data>
- Silvia, A., & Susilowati, D. (2023). *FAKTOR-FAKTOR PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU JAWA*. 07(04), 531–539.
- Teixeira, P. N. (2014). Gary Stanley Becker (1930-2014). Economics as a study of human behaviour. *History of Economic Ideas*, 22(2), 9–22.
- Utami, T. W., Susanto, P. C., Sawitri, N. N., Lesmini, L., Setyowati, T. M., Belani, S., Pratiwi, E., Perwitasari, Marlita, D., Mulyanto, Setyawati, A., Roza,

- N., Tahir, Sabilillah, A. M., Indryati, Hasibuan, L., & Jumawan, T. W. (2023). *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (A. Hardana (ed.)). CV. Aryanda Mandiri.
- Utomo, C. P. (2022). *The Factors of Affecting Labor Absorption in Java Island*. 5(1), 1444–1452.
- Weiss, Y. (2015). Gary Becker on Human Capital. *Journal of Demographic Economics*, 81(1), 27–31. <https://doi.org/10.1017/dem.2014.4>
- Wiasih, N. K. P., & Karmini, N. L. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja, Dan Tingkat Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(12), 1097. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i12.p05>
- Yuda Pratama, M., Rahmi, D., & Amaliah, I. (2022). Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 108–116. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.1406>